



Strategi Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Jabatan Gubernur Sherly Tjoanda Maluku Utara

Ivena Callista Putri¹, Ayunda Putri Athamevia², Eva Hany Fanida³, Revienda Anita Fitrie⁴

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi : 250040674120@mhs.unesa.ac.id, 25040674109@mhs.unesa.ac.id,
evafanida@unesa.ac.id, reviendafitrie@unesa.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: Mei 2026

ABSTRACT

This study analyzes how the strategy for optimal management of the regional budget (APBD) during the term of Governor Sherly Tjoanda in North Maluku can be managed optimally. This study has a primary focus on evaluating public financial management that covers four crucial aspects, namely education, health, infrastructure, and public welfare. The method used in this study is a qualitative approach with analytical descriptive specifications through library studies (library search). Using data collection techniques by quoting from various relevant scientific articles and online news which are then analyzed qualitatively to produce a comprehensive picture of the main discussion. The results of the study indicate that development disparities in North Maluku through strategic interventions in various public service sectors have been answered through the implementation of strategies by the Government.

Keywords: *Public finance, APBD optimization, strategic intervention, public welfare, health, education, infrastructure, Governor Sherly Tjoanda.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis bagaimana strategi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara optimal pada masa jabatan Gubernur Sherly Tjoanda di Maluku Utara dapat dikelola secara optimal. Penelitian ini memiliki fokus utama yakni mengevaluasi pengelolaan keuangan publik yang mencakup empat aspek krusial di antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan (library search). Menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengutip dari berbagai artikel ilmiah dan berita daring yang relevan yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai pembahasan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pembangunan di Maluku Utara melalui intervensi strategis pada berbagai sektor pelayanan publik telah terjawab melalui penerapan strategi oleh Pemerintah.

Kata Kunci: *Keuangan publik, optimalisasi APBD, intervensi strategis, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, Gubernur Sherly Tjoanda.*

PENDAHULUAN

Keuangan publik dalam penelitian ini juga dapat disebut dengan keuangan negara yang memiliki ketentuan konstitusional yakni di pasal 23 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesungguhnya merupakan kerangka dasar yang mengatur secara menyeluruh mengenai bagaimana negara merencanakan, mengalokasikan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya keuangan yang dimilikinya. Perancangan pasal ini berprinsip dasar bahwa tata kelola fiskal negara memastikan setiap tindakan Pemerintah di bidang keuangan pasti dilandasi transparansi, akuntabilitas, legalitas, serta berpihak pada kepentingan umum. Keuangan negara memiliki definisi secara luas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yakni, mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk penerimaan dan pengeluaran negara yang berupa uang maupun barang atau yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara tersebut. Dalam artian definisi tersebut mempertegas kepastian hukum serta mencegah penyempitan makna keuangan negara termasuk seluruh aset, kewajiban, dan potensi ekonomi negara berada dalam pengelolaan di satu sistem terpadu, transparan, serta akuntabel sesuai dengan prinsip *good governance*. Presiden selaku kepala pemerintahan merupakan penanggung jawab utama dalam mengatur keuangan negara secara konstitusional. Tetapi dalam pelaksanaannya kewenangan ini diberikan kepada Menteri Keuangan.

Mengetahui definisi luas mengenai keuangan negara sebagai proses untuk mencapai tujuan negara secara sistematis dan terintegrasi dalam membiayai seluruh pembangunan dan kegiatan pemerintahan negara di periode waktu tertentu dengan menentukan kebijakan, mengalokasikan dana, serta mengidentifikasi sumber daya. Maka dapat diketahui juga dua instrumen utama pada penelitian ini yakni, Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat (APBN) dan tingkat daerah yakni Anggaran Pendapatan dan Daerah (APBD). APBN dan APBD tentunya memiliki beberapa perbedaan diantara lain ruang lingkup, penanggung jawab, Lembaga legislatif, produk hukum, sumber utama pendapatan, serta transfer.

Namun penelitian ini akan difokuskan pada APBD yang definisinya sendiri merupakan instrumen desentralisasi fiskal guna meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat daerah, serta bentuk perencanaan program kerja keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD memiliki sumber pendapatan utama yakni PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan anggaran yang diperoleh dari penerimaan oleh Pemerintah Daerah setelah memberikan pelayanan tertentu dari penduduk wilayah. Penerimaan dari banyaknya jenis pajak daerah, retribusi daerah menjadi salah satu komponen utama PAD. Dalam melaksanakan berbagai proyek pembangunan di daerah, PAD memiliki peran penting dalam menjadi indikator kesehatan daerah. Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017). APBD memiliki empat bagian utama yakni belanja pegawai,

belanja, modal, belanja barang dan jasa, serta belanja lainnya. Dengan persentase belanja pegawai 38,5%, belanja barang dan jasa, 22,2%, belanja modal 21,2%, dan belanja lainnya 18,2%.

Pada masa jabatan Gubernur Sherly Tjoanda, Maluku Utara tercatat berada di peringkat kelima nasional dalam realisasi pendapatan daerah. Hal ini berarti bahwa pengelolaan pendapatan daerah relatif terjaga sepanjang 2025, meskipun tantangan percepatan belanja masih terlihat pada sejumlah pos pengeluaran.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil data dari berbagai artikel ilmiah dan berita daring yang relevan untuk memberikan data sedetail mungkin untuk memperoleh suatu kesimpulan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Selanjutnya, analisis data secara kualitatif yaitu dengan memberikan arti dan kemudian diuraikan dengan kalimat perkalimat secara jelas serta dihubungkan untuk menjawab permasalahan yang ada untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan gambaran secara umum terhadap permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Program Ketenagakerjaan di Kecamatan Semampir

Politikus Indonesia dari Partai Demokrat, Sherly Tjoanda Laos merupakan Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara pada 20 Februari 2025. Istri dari calon Gubernur Maluku Utara ini menggantikan posisi suami, Benny Laos, untuk maju dalam Pilkada Maluku Utara 2024 dan berhasil mendapatkan suara terbanyak serta resmi menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara periode 2025-2030. Pada saat prosesi pelantikan kepala daerah, Sherly Tjoanda memastikan bahwa akan menindaklanjuti program presiden dengan membangun infrastruktur jalan, jembatan, Pendidikan, dan Kesehatan untuk rakyat Maluku Utara.

Pada rapat paripurna, 2 Desember 2024 DPRD Provinsi Maluku Utara resmi mengesahkan APBD tahun 2025 sebagai penanda Langkah penting dalam perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran. Dalam laporan Badan Anggaran DPRD, pendapatan daerah tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp3.335.219.447.680. Anggaran ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp760.503.804.700 yang mencakup Pajak Daerah Rp610.044.745.423, Retribusi Daerah Rp10.159.337.186, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp3.226.037.000, dan Lain-lain PAD yang Sah Rp137.073.685.091.

Kemudian, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.574.515.642.980 dan Pendapatan Hibah Rp200.000.000. Sementara itu, belanja daerah tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp3.304.750.365.760, yang terdiri dari Belanja Operasi Rp2.501.334.597.510,42; Belanja Modal Rp456.350.202.534,49; Belanja Tidak Terduga Rp35.000.000.000; dan Belanja Transfer Rp312.065.565.715,09, yang meliputi Belanja Bagi Hasil. DPRD juga melaporkan adanya surplus sebesar Rp30.469.081.920, yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien.

Dalam sidang, DPRD menegaskan bahwa alokasi anggaran ini difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi belanja operasional. Dengan ini, Maluku Utara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat pembangunan infrastruktur strategis. APBD 2025 menjadi landasan penting bagi Pemerintah Daerah untuk merealisasikan program-program prioritas yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Pada masa jabatan Gubernur Sherly Tjoanda tahun 2025 terdapat beberapa strategi pembangunan daerah upaya merealisasikan anggaran secara efektif, khususnya di empat aspek utama yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat yang pembahasan secara luasnya sebagai berikut:

1. Pendidikan

Secara umum dan sederhana pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia dalam menumbuhkan dan mengembangkan segala potensi pembawaan yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat baik dari jasmani maupun rohani. Pendidikan secara sempit dapat dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan, tetapi Pendidikan secara luas juga dapat dipandang sebagai usaha untuk mewujudkan kebutuhan, keinginan, dan kemampuan bagi individu untuk mencapai pola hidup sosial dan pribadi yang memuaskan. Pendidikan tidak hanya dijadikan sebagai sarana untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang, tetapi juga menjadi salah satu aspek penting bagi kehidupan anak sekarang yang sedang berada di proses perkembangan dalam menuju tingkat kedewasaan. Menurut H. Horne, pendidikan adalah proses yang di lakukan terus menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia. Dengan ini Pendidikan menjadi sesuatu yang bertaraf bagi kehidupan bangsa serta menjadi landasan yang diterapkan dalam kehidupan guna memperbaiki sistem kehidupan agar lebih tertata dan sesuai landasan agama.

Setiap individu tentunya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak guna mencerdaskan bangsa serta meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Dengan ini Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meresmikan revitalisasi sekolah dan meluncurkan program prioritas pendidikan, sejumlah proyek pembangunan sarana pendidikan hasil revitalisasi APBD Tahun Anggaran 2025. 68 sekolah telah direvitalisasi menggunakan APBD dengan anggaran sebesar Rp53 miliar, sementara itu sebanyak 75 sekolah dianggarkan dalam APBN dengan total Rp92 miliar. Dengan rincian penganggaran Rp3,7 miliar untuk auditorium SMAN 5, Rp3 miliar untuk gedung kelas SMAN 2 Ternate, Rp2,2 miliar untuk gedung kelas SMKN 1 Pulau Taliabu, Rp2,1 miliar untuk SMAN 2 Haltim, Rp1,8 miliar untuk gedung kelas SMAN 1 Halteng, dan Rp1,7 miliar gedung kelas SMAN 8 Ternate.

Inspektorat telah mengaudit penggunaan dana BOSP dan BOSDA senilai Rp180 miliar guna memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Maluku naik dari 48 ke target yakni 80. Hal ini merupakan upaya mewujudkan fokus utama tahun 2026 yakni transisi dari pembangunan fisik menuju peningkatan kualitas SDM. Dilanjut dengan program BOSDA yang menyediakan subsidi untuk siswa SMAN 5

Ternate yakni sebesar Rp500 Juta/tahun, lalu digitalisasi untuk seluruh SMA/SMK/SLB melalui pengadaan 600 unit komputer per tahun secara konsisten hingga tahun 2029. Serta program beasiswa untuk 1000 siswa berprestasi pada jurusan yang dibutuhkan daerah yang sedang diproses kerjasamanya dengan UGM, UI, ITB, dan ITB. Juga Terdapat pembangunan sekolah rakyat pada dua lokasi yakni di Desa Rioribati, Kabupaten Halmahera Barat dan di Desa Kukumutuk, Kabupaten Halmahera Utara yang rampung pada Juni 2026. Total anggaran pada masing-masing pembangunan sebesar Rp250 miliar yang diambil dari APBN.

2. Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Pada UU No. 23 Tahun 1992 “Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Dengan ini kesehatan masyarakat adalah pilar pembangunan suatu bangsa dan merupakan sebagian dari hak asasi manusia dan bentuk kesejahteraan sebagaimana UUD NRI Tahun 1945 guna mewujudkan cita-cita bangsa. Setiap individu berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak yakni melalui upaya Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Pembangunan pada aspek kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan sebagai upaya dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal serta meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemauan hidup sehat bagi setiap individu.

Terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, guna sebagai bentuk tanggung jawab dalam memastikan seluruh masyarakat dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang adil dan berkualitas, serta secara tegas menyatakan bahwa layanan kesehatan bukan sekadar program, namun hak dasar masyarakat yang wajib dijamin oleh negara. Upaya tersebut meliputi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi SMA/SMK/SLB termasuk guru dan siswa guna memastikan standar kesehatan nasional terpenuhi sejak bangku sekolah. Proyek ini dianggarkan dari BOSDA sebesar Rp34 miliar. Dengan adanya program CKG, masyarakat dapat memerhatikan beberapa poin krusial yang didapat berdasarkan data kumulatif skrining total sebanyak 34.715 siswa Provinsi Maluku Utara yang yang perlu diperhatikan. Perinciannya sebagai berikut:

- 16.703 kasus karies gigi menjadi temuan terbanyak yang diikuti oleh 18.337 siswa yang tercatat kurangnya aktivitas fisik
- Untuk penyakit tidak menular 2.840 siswa tercatat mengalami prehipertensi dan terdeteksi pre-diabetes bagi 545 siswa
- 3.609 siswa terindikasi mengalami kurang gizi dan 5.951 siswa berisiko terkena gangguan reproduksi
- Serta tercatat 2.042 siswa memiliki kebiasaan merokok

Data tersebut bukan merupakan sekadar angka tetapi perlu dijadikan evaluasi bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan intervensi medis dan mengedukasi di lingkungan sekolah mengenai pola hidup sehat. Dengan adanya skrining ini maka seluruh masyarakat harus memastikan bahwa generasi penerus harus tumbuh sehat dan mampu bersaing secara global.

Selain program Cek Kesehatan Gratis (CKG) anggaran kurang lebih Rp149 miliar yang bersumber dari DAK telah digunakan untuk pembangunan gedung baru RSUD Sanana. Pembangunan ini menjadi salah satu upaya mewujudkan kesehatan yang berkualitas, pembangunan infrastruktur kesehatan, peningkatan SDM tenaga medis, serta kesejahteraan tenaga medis profesional di daerah.

Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab dalam memastikan seluruh warga tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas dan adil, sembilan kabupaten dan kota di Maluku Utara kini telah menandatangani kerjasama penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Program ini dialokasikan anggaran dari DBH regular Rp5 miliar dan DBH terhutang tahun 2026 Rp5 miliar terkait daerah yang masih memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Meskipun demikian anggaran DBH tersebut hanya menutup Rp10 miliar dari total tunggakan BPJS yang sekitar Rp17,5 miliar, dengan ini sisa tunggakan akan dianggari oleh APBD 2026.

3. Infrastruktur

Kosakata infrastruktur diambil dari bahasa Perancis yakni *infra* berarti bawah dan *structure* yang berarti bangunan. Dalam kamus bahasa Indonesia sendiri infrastruktur merupakan beragam sistem yang dikelola oleh Pemerintah berbentuk komponen fisik seperti jalan dan jembatan. Apabila dipandang dari sisi masyarakat tentunya memiliki peran penting bagi kelangsungan sosial dan ekonomi. Kesenjangan infrastruktur antar provinsi masih seringkali menjadi faktor utama di Indonesia. Dengan ini pemerintahan daerah perlu melakukan pemerataan infrastruktur guna menjaga pertumbuhan ekonomi secara positif. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan menunjukkan adanya peningkatan perekonomian. Menjadi prioritas, anggaran infrastruktur akan dialokasikan melalui dana APBN dan APBD.

Secara resmi Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menggerakkan program bantuan rumah tidak layak huni (RLTH) yang ditujukan pada masyarakat yang kurang mampu. Program ini dianggarkan menggunakan anggaran tahun 2025. Bantuan disalurkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman provinsi Maluku Utara melalui bahan bangunan dan biaya upah tukang bukan berupa rumah siap huni. Program ini akan menginventarisasi secara bertahap dan kini Provinsi Maluku Utara telah menginventarisasi hampir 50 ribu rumah yang tidak layak huni. 40 unit rumah tidak layak huni di Kota Ternate telah menerima bantuan dengan rincian 10 unit rehabilitasi berat, 10 unit rehabilitasi sedang dan 20 unit pembangunan dapur sehat. Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan yakni Rp50 juta untuk pembangunan baru dan pekerjaan berat, Rp35 juta untuk rehabilitasi, dan Rp25 juta untuk dapur sehat.

Dalam pembangunan infrastruktur, Gubernur Maluku Utara juga memprioritaskan sektor pertanian dengan membangun jalan tani. Jalan tani merupakan salah satu kebutuhan penting yang perlu segera dibangun demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para petani. Hal ini tentunya sangat krusial karena memengaruhi nilai tukar petani secara langsung, jika para petani tidak mendapat akses jalan yang layak sehingga kesulitan dalam mendistribusikan hasil panen ke pasar dan konsumen maka nilai tukar petani tidak akan meningkat.

Pada tahun 2025 anggaran hanya mampu membiayai 40 kilometer jalan tani dikarenakan biaya pembangunan perkilometer nya mencapai Rp250 juta sehingga memiliki keterbatasan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalokasikan anggaran lebih besar pada tahun 2026 sebagai upaya membangun akses pertanian baru.

Untuk memastikan akses layanan pendidikan, distribusi logistik, dan kesehatan di wilayah terluar dan terisolasi tidak terhambat, pembangunan infrastruktur dasar telah menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Provinsi. Dengan ini telah dialokasikan anggaran dari APBD 2026 sebesar Rp30,9 miliar untuk membangun tiga jembatan, ketiganya meliputi Jembatan Ake Bibinoi sepanjang 60 meter, Jembatan Ake Raim sepanjang 50 meter, serta Jembatan Ake Mou sepanjang 30 meter.

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan menjadi indikator utama dalam menentukan sejahtera atau tidak nya kondisi dalam kelompok atau individu. Selain itu kesejahteraan juga menjadi gambaran keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kesejahteraan yakni umur, jumlah tanggungan keluarga, tabungan, lokasi tempat tinggal, pendapatan keluarga, dan beban hutang keluarga. Namun permasalahan kesejahteraan ini tidak dapat terselesaikan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama negara berkembang seperti Indonesia masih belum stabil dalam pertumbuhan ekonominya sehingga masih banyak ditemukan ketimpangan dan kesenjangan antar masyarakat yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan.

Seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan, termasuk para nelayan. Dengan ini, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, telah mengupayakan melalui program bantuan serta mendirikan kampung nelayan guna memberdayakan para nelayan. Peran nelayan itu sendiri sangat penting dalam kelangsungan ketahanan pangan di Indonesia, maka dari itu telah dialokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk dinas perikanan. Anggaran tersebut diperuntukan sebagai bantuan dalam bentuk alat tangkap dan sarana prasarana untuk mendukung sentra perikanan di Maluku Utara. Sebanyak 175 unit kapal nelayan dengan variasi ukuran 3 GT dan 1,5 GT serta alat tangkap senilai Rp22 miliar telah diserahkan dan akan di subsidi Pemerintah Provinsi pada setoran awal sebesar Rp200 ribu lalu akan dilanjutkan oleh nelayan itu sendiri setiap tahun nya. Di tahun 2025 program kampung nelayan hanya di fokuskan pada tiga daerah di Ternate yakni Dufa-dufa, Haltim, Sula, dan di tentatif Hansel. Kegiatan kampung nelayan ini meliputi penyerahan bantuan yang diantara lain bantuan beasiswa anak nelayan, bantuan renovasi RLTH sebanyak 700 unit, santunan kematian, penyerahan BPJS ketenagakerjaan kepada 4 orang penerima, serta bantuan armada dan alat tangkap kepada 10 orang penerima. Dengan diberlakukannya program ini, diharapkan ekonomi di masyarakat dapat meningkat serta dapat menghidupkan kembali kewirausahaan.

Ada kalanya pada saat-saat tertentu khususnya saat momentum Hari Besar bahan pangan mengalami lonjakan harga karena permintaan naik. Tentunya fenomena ini perlu perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi dalam menjaga kestabilan harga guna menyejahterakan masyarakat. Dengan ini terdapat upaya

Pemerintah Provinsi yakni program pangan murah yang dilaksanakan melalui Dinas Pangan dengan menggandeng Perum Bulog serta Bank Indonesia sebagai strategis dalam penyediaan dan distribusi bahan pangan. Program ini tentunya sangat menguntungkan masyarakat khususnya pada masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dengan tantangan distribusi logistik. Tujuan spesifik dari program tersebut yakni mengendalikan inflasi daerah, menjaga ketersediaan stok pangan dan mudah dijangkau masyarakat, serta mengantisipasi fluktuasi harga di pasar.

Aspek agama juga dapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi dalam hak untuk mendapat kesejahteraan. Hal ini diupayakan dengan disalurkan nya hibah APBD Tahun 2025 sebesar Rp43 miliar untuk lebih dari 100 rumah ibadah yang meliputi gereja, masjid, dan musala. Pemetaan rumah ibadah juga telah dilaksanakan di Maluku Utara sebagai upaya untuk memperoleh basis data valid terkait kondisi bangunan yang mengalami kerusakan. Program ini bertujuan meningkatkan kenyamanan masyarakat yang beribadah serta mendukung kegiatan keagamaan.

SIMPULAN

Strategi optimalisasi pengelolaan keuangan publik secara komprehensif pada masa kepemimpinan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda pada periode 2025-2026 telah menjawab disparitas pembangunan Maluku Utara dengan instrument intervensi strategis. Dapat disimpulkan Pemerintah Daerah berhasil menyeimbangkan antara belanja sosial untuk perlindungan masyarakat dengan belanja modal untuk konektivitas wilayah melalui analisis empat aspek utama yang meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi perencanaan dan otoritas dinilai berjalan efektif karena keberhasilan daerah dalam mencapai peringkat kelima tingkat nasional dalam realisasi pendapatan. Sinergi fiskal yang solid antar Pemerintah Pusat dengan daerah tercipta karena adanya integrasi dana APBD dan APBN sebagai anggaran utama dalam keberlangsungan seluruh program. Di tengah permintaan pembangunan yang masif prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap terjaga melalui indikator yang didapat dari surplus anggaran.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd Rahman, B. P., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani, Y. (2022). Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. *Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1-8. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/al-urwatul-wutsqa/article/view/7757>
- Bipayung, B. (2026). *Hukum administrasi keuangan negara*. Metro: Nafal Publishing. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Maluku Utara. (n.d.). Gubernur Sherly luncurkan CKG, pastikan 70.000 pelajar SMA, SMK, dan SLB terlayani kesehatan gratis. <https://malutprov.go.id/berita-pemprov/gubernur-sherly-luncurkan-ckg-pastikan-70000-pelajar-smasmkdan-slb-terlayani-kesehatan-gratis>

-
- Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Maluku Utara. (n.d.). *Hadiri groundbreaking RSUD Sanana, Wagub Maluku minta dukungan Menkes RI*. <https://malutprov.go.id/berita-pemprov/hadiri-groundbreaking-rsud-sanana-wagub-malut-minta-dukkungan-menkes-ri>
- Isriawaty, F. S. (2015). *Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Doctoral dissertation, Tadulako University). <http://repository.untad.ac.id/id/eprint/391/>
- MalutPost.com. (2026, Februari 5). *Pembangunan dua sekolah rakyat di Maluku Utara, Gubernur Sherly: Masing-masing Rp250 miliar*. <https://malutpost.com/pembangunan-dua-sekolah-rakyat-di-maluku-utara-gubernur-sherly-masing-masing-rp250-miliar/>
- Prasetyo, R. B., & Firdaus, M. (2009). Pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 222-236. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jekp/article/view/20563>
- Rahayu, H. C. (2023). Analisis kesejahteraan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 77-85. <https://doi.org/10.37034/infec.v5i1.206>
- Riduansyah, M. (2003). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 7(2), 49-57. <https://doi.org/10.7454/mssh.v7i2.44>
- Ryadi, A. L. S. (2016). *Ilmu kesehatan masyarakat*. Penerbit Andi.
- Sukwika, T. (2018). Peran pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6(2), 115-130. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>